

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Rabu 30 Oktober 2024
Wilayah	Kabuapten Takalar



OKP Takalar Tuntut Dana Hibah Kepemudaan

OKP Takalar Tuntut Dana Hibah Kepemudaan

TAKALAR, TRIBUN - Organisasi Kepemudaan (OKP) unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Depan Kantor Bupati Takalar, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (29/10/2024).

Massa empat organisasi mengatasnamakan HMI, PMII, IMM, Hipermata. Mereka menutup dua jalur jalan poros Takalar-Makassar. Alhasil pengendara tertahan di depan kantor bupati. Sili berganti massa aksi berorasi. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk protes.

Ketua HMI Cabang Takalar, Muhammad Kasim mengatakan, di momentum Sumpah Pemuda, Pemkab Takalar perlu mempertimbangkan kembali skema pengelolaan anggaran kepemudaan di Takalar. Menurutnya dana kepemudaan yang dikelola KNPI belum maksimal. Ia menyebut, pada

2022 dianggarkan dana hibah kepemudaan Rp 100 juta yang dikelola KNPI. Namun, pengurus KNPI tidak mencairkan. Justru menggembalkannya ke Pemkab Takalar sebagai dana Silpa. "Skema pengelolaan dana hibah kepemudaan oleh KNPI perlu dipertimbangkan kembali. Karena dalam pengelolaan tidak maksimal," katanya.

Ketua PMII Takalar, Nur Alim Syarif menambahkan dana hibah kepemudaan seharusnya diberikan langsung kepada organisasi kepemudaan dan kedaerahan, tidak perlu harus melalui KNPI. "Tidak ada aturan dana hibah kepemudaan harus melalui KNPI. Yang ada adalah dana hibah kepemudaan diberikan kepada OKP sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku," katanya.

Selain dana hibah, 4 organisasi kepemudaan dan kedaerahan juga menuntut adanya Aula Kepemudaan. "Tempat untuk seluruh pemuda berkreatif dan berkreativitas, di mana ini akan semakin mendukung pengembangan kepemudaan di

Takalar," kata Ketua PB Hipermata Nasrum.

Aspirasi OKP diterima oleh tujuh anggota DPRD Takalar, yakni Nur Alim Rukman, Ichsan Ariansyah Muchtar, Fadel Achmad, Sri Reski Ulandari, Israwati, Ibrahim Bakri, dan Hilal Hamzah Hisbul Sajadah. Wakil Ketua DPRD Takalar, Fadel Achmad mengatakan, DPRD Takalar akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan

membawanya pada forum lebih lanjut. Mengenai pengelolaan dana hibah tidak melalui KNPI, Fadel mengatakan akan mengecek dulu regulasinya.

"Kami akan mengecek dulu regulasinya, seperti apa karena beberapa tahun belakangan pelaksanaannya seperti itu di Takalar. Selain itu, kami juga akan berkordinasi dengan eksekutif terkait hal itu," katanya. (mkr)